

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DESA PINANG BANJAR BERBASIS SINERGI ANTAR *STAKEHOLDER*

Aisyah Berliana Safitri^{1(a)}, Junaidi^{2(b)}, Intan Dwi Permata Sari^{3(c)}, Syarifah Aini^{4(d)},
Radia Keril^{5(e)}, Taufal Sen You^{6(f)}

^{1,2,3,4,5,6}Prodi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

^{a)}aisyahberlianasafitri@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

19-12-2025

Diterbitkan Online:

31-03-2026

Kata Kunci:

Analisis, Kebijakan,
Pengembangan, Ekowisata,
Stakeholder

Keywords:

Analysis, Policy, Development,
Ecotourism, Stakeholders

Corresponding Author:

aisyahberlianasafitri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam pengembangan ekowisata Desa Pinang Banjar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dengan menekankan pentingnya sinergi antar-stakeholder sebagai dasar implementasi kebijakan. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi permasalahan utama serta perumusan alternatif kebijakan yang paling layak dan implementatif, khususnya dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kondisi *policy vacuum*, yaitu belum adanya kebijakan spesifik di tingkat kabupaten serta belum terintegrasinya pengembangan ekowisata dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RIPPARD. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan komprehensif dengan model Patton dan Sawicki. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan tiga informan kunci, yaitu pengelola ekowisata setempat. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sinergi antar-stakeholder menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan ekowisata. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya dukungan anggaran, belum terbentuknya kelembagaan formal, rendahnya kapasitas masyarakat, serta tidak terintegrasinya program dalam perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa alternatif kebijakan yang bersifat parsial tidak cukup efektif. Oleh karena itu, kebijakan yang paling layak adalah pendekatan integratif yang mengombinasikan penguatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), penguatan promosi digital, serta integrasi kebijakan daerah dengan peningkatan sinergi antar-stakeholder. Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan dalam mendorong pengembangan ekowisata yang inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze policy alternatives for the development of ecotourism in Pinang Banjar Village, Gelumbang District, Muara Enim Regency, by emphasizing the importance of stakeholder synergy as the foundation for policy implementation. The research focuses on identifying key problems and formulating the most feasible and implementable policy alternatives, particularly in addressing infrastructure limitations and the condition of policy vacuum, defined as the absence of specific policies at the regency level and the lack of integration of ecotourism development into regional planning documents such as the RPJMD and RIPPARD. This study employs a comprehensive policy analysis approach using the Patton and Sawicki model. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving three key informants, namely local ecotourism managers. The analysis was conducted based on the criteria of effectiveness, efficiency, equity, political feasibility, and administrative sustainability. The findings indicate that weak stakeholder synergy is the primary factor hindering ecotourism development. This condition affects

limited budget support, the absence of formal management institutions, low community capacity, and the lack of integration of ecotourism into regional development planning. These findings suggest that partial policy alternatives are insufficiently effective. Therefore, the most feasible policy alternative is an integrative approach that combines strengthening basic infrastructure, community empowerment through the establishment of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), enhancement of digital promotion, and integration of regional policies with improved stakeholder synergy. This recommendation is expected to serve as a reference for promoting inclusive and sustainable ecotourism development.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i1.338>

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi alam dan sosial secara berkelanjutan. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang konservatif, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat (Direktorat Jenderal Pariwisata, 1995). Dalam pengembangannya, keberhasilan ekowisata tidak hanya ditentukan oleh potensi alam, tetapi juga oleh kesiapan unsur pendukung pariwisata. Daya Tarik Wisata Menurut Cooper et al. (1995) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: attraction, accessibility, amenity dan ancilliary. Dari keempat komponen tersebut, aspek *accessibility* dan *amenity* memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur, seperti kondisi jalan, transportasi, fasilitas dasar, dan sarana pendukung lainnya yang berperan penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan.

Desa Pinang Banjar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim memiliki potensi ekowisata yang menarik berupa kawasan danau sebagai daya tarik utama serta aktivitas masyarakat setempat yang berpotensi menjadi daya tarik wisata. Desa Pinang Banjar di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, memiliki potensi ekowisata yang menjanjikan melalui perpaduan keindahan alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Keberadaan danau alami dengan lingkungan yang asri menjadi daya tarik utama yang

mendukung berbagai aktivitas wisata alam, seperti wisata perahu, berkemah, dan rekreasi berbasis alam. Potensi ini diperkuat oleh keterlibatan UMKM desa yang memproduksi olahan khas, seperti ikan asin, terasi, kemplang, dan pindang patin, sebagai sumber ekonomi masyarakat. Selain itu, aktivitas budaya lokal seperti lomba layang-layang serta kehidupan pedesaan yang autentik turut memperkaya pengalaman wisata. Sinergi antara sumber daya alam, ekonomi lokal, dan budaya masyarakat menjadikan Desa Pinang Banjar memiliki nilai strategis untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berbasis masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

Namun hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum berkembang secara optimal. Pengembangan wisata desa membutuhkan dukungan infrastruktur, kapasitas masyarakat, promosi, dan koordinasi antar-stakeholder. Kondisi di Desa Pinang Banjar menunjukkan bahwa beberapa aspek tersebut belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil analisis, terdapat lima masalah utama yang menjadi hambatan pengembangan ekowisata di Desa Pinang Banjar. Masalah pertama adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung ekowisata, seperti akses jalan yang belum memadai, fasilitas publik yang terbatas, serta lemahnya jaringan internet, sehingga menurunkan kenyamanan dan minat kunjungan wisatawan. Masalah kedua adalah minimnya keterlibatan dan kapasitas masyarakat lokal akibat kurangnya pelatihan dan belum terbentuknya kelembagaan pengelola wisata, yang menyebabkan manfaat ekonomi belum berkembang optimal. Masalah ketiga berkaitan dengan keterbatasan promosi dan penyebaran informasi, baik secara digital maupun konvensional, sehingga ekowisata Desa Pinang

Banjar belum dikenal luas meskipun memiliki potensi yang besar. Masalah keempat adalah lemahnya sinergi antar-stakeholder, di mana koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya belum berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun permasalahan terakhir adalah belum adanya payung kebijakan khusus yang mengatur pengembangan ekowisata serta belum tercantumnya Desa Pinang Banjar dalam RPJMD, yang menimbulkan kondisi kekosongan kebijakan (*policy vacuum*) dan berdampak pada terbatasnya dukungan program serta anggaran.

Dari aspek regulasi, Undang Undang Nomor 10 Pasal 19 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 72 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan potensi wisata secara mandiri. Namun tanpa dukungan kebijakan daerah dalam bentuk program, pendampingan, dan alokasi anggaran, pengembangan ekowisata di tingkat desa akan berjalan tidak optimal. Inilah yang terjadi di Desa Pinang Banjar, di mana belum adanya dukungan formal dari pemerintah daerah menyebabkan pengembangan potensi wisata tidak memiliki arah yang jelas.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengembangan ekowisata dari berbagai perspektif. Akbar et al. (2023) dalam penelitiannya mengenai pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Desa Pasanggrahan menemukan bahwa penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keberlanjutan destinasi wisata. Anggraini & Marheni (2023) juga menegaskan bahwa strategi pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat mampu meningkatkan eksistensi ekowisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal desa wisata.

Selain itu, Hidayat (2016) menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan lemahnya promosi menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekowisata desa, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan perencanaan yang terarah. Penelitian lain oleh Haryono & Albetris (2022) menyoroti pentingnya pemanfaatan promosi digital melalui e-tourism marketing untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek potensi, strategi pengelolaan, dan dampak ekonomi,

sementara kajian yang menganalisis pengembangan ekowisata dalam perspektif kebijakan publik, khususnya terkait sinergi antar-stakeholder dan kekosongan kebijakan daerah, masih relatif terbatas.

Selain itu, pembahasan mengenai pengembangan ekowisata Desa Pinang Banjar masih terbatas dan belum dianalisis menggunakan pendekatan analisis kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengidentifikasi kondisi empiris, memetakan masalah utama, serta menyusun alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mendorong pengembangan wisata berbasis masyarakat. Namun demikian, berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui satu intervensi kebijakan secara terpisah. Upaya perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, atau promosi wisata yang dilakukan secara parsial cenderung tidak berkelanjutan karena tidak didukung oleh kerangka kebijakan yang terintegrasi dan koordinasi antar stakeholder yang kuat. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan kebijakan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana menyusun alternatif kebijakan yang mampu menjembatani keterkaitan antar permasalahan secara komprehensif. Selain itu, belum terintegrasinya pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RIPPARD menjadi faktor kunci yang memperlemah efektivitas berbagai upaya pengembangan yang telah dilakukan. Ketiadaan integrasi tersebut tidak hanya membatasi legitimasi kebijakan, tetapi juga berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor serta keterbatasan dukungan anggaran dan program. Oleh karena itu, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan daerah menjadi elemen strategis yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan ekowisata secara berkelanjutan. Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan kebijakan utama yang menghambat pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar dan mengapa permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui satu intervensi kebijakan saja?

2. Alternatif kebijakan apa yang paling layak dan implementatif untuk mendorong pengembangan ekowisata Desa Pinang Banjar berdasarkan kriteria analisis Patton Sawicki?

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengembangan ekowisata Desa Pinang Banjar dan merumuskan alternatif kebijakan yang lebih implementatif dalam mendukung pengembangan wisata desa secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis permasalahan kebijakan dalam pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar serta merumuskan alternatif kebijakan yang paling layak dan implementatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami kondisi empiris di tingkat desa dan keterkaitannya dengan kerangka kebijakan yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan teknik purposive sampling.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Ekowisata Desa Pinang Banjar. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bu Rusma, pengelola Ekowisata Desa Pinang Banjar;
2. Bapak Sangkut Roni, pengelola Ekowisata Desa Pinang Banjar;
3. Kak Jainari, pengelola Ekowisata Desa Pinang Banjar

Analisis mengenai sinergi antar stakeholder dan kondisi kekosongan kebijakan (policy vacuum) dilakukan berdasarkan temuan wawancara dan observasi, serta melalui penelusuran terbatas terhadap dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD dan RIPPARD Kabupaten Muara Enim, untuk mengecek keberadaan atau ketiadaan pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar dalam perencanaan daerah.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Permasalahan utama yang teridentifikasi menjadi dasar perumusan alternatif kebijakan. Perumusan dan penilaian alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan model Patton dan Sawicki

berdasarkan lima kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Setiap alternatif dinilai dengan skor 1 sampai 3, di mana skor diberikan oleh peneliti sebagai analisis kebijakan berdasarkan sintesis data wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen perencanaan. Seluruh kriteria diberi bobot yang sama untuk menjaga konsistensi penilaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Kebijakan

Analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi lima permasalahan utama yang menghambat pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar serta merumuskan alternatif kebijakan yang paling relevan dan implementatif bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Profil kebijakan yang dikaji berfokus pada kondisi aktual pengelolaan ekowisata yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas dan keterlibatan masyarakat, lemahnya promosi, minimnya sinergi antar-stakeholder, serta belum adanya payung kebijakan yang mendukung pengembangan wisata secara formal.

Aktor kunci yang terlibat dalam kebijakan ini terdiri dari Pemerintah Desa Pinang Banjar, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Dinas Pariwisata, masyarakat lokal, dan akademisi yang berperan dalam pendampingan teknis. Kebijakan ini diyakini berpotensi mencapai sasaran karena mengintegrasikan potensi lokal dengan dukungan kelembagaan, memperkuat kapasitas masyarakat sebagai pengelola inti, serta mendorong koordinasi lintas aktor yang sesuai dengan kebutuhan empiris di lapangan.

Kriteria Evaluasi

Evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan pengembangan ekowisata Desa Pinang Banjar dilakukan dengan menggunakan konsep (Patton & Sawicki, 2012) dalam Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Kriteria ini meliputi enam aspek utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan. Setiap kriteria disusun dalam skala penilaian 1–3 guna memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif dan sistematis. Kriteria tersebut digunakan untuk menilai kelayakan masing-masing alternatif kebijakan agar dapat menghasilkan pilihan kebijakan yang paling

sesuai dengan kondisi nyata pengembangan ekowisata di Desa Pinang Banjar.

Kriteria efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana alternatif kebijakan mampu mencapai tujuan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Pinang Banjar. Nilai 1 (rendah) menggambarkan kondisi eksisting, di mana potensi ekowisata belum dikelola secara optimal, infrastruktur pendukung terbatas, promosi wisata belum terarah, serta partisipasi masyarakat masih rendah sehingga belum mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan maupun kesejahteraan masyarakat. Nilai 2 (sedang) menunjukkan efektivitas yang mulai terlihat, misalnya ketika sebagian fasilitas wisata mulai diperbaiki, masyarakat mulai terlibat dalam kegiatan wisata, serta promosi mulai dilakukan meskipun belum konsisten. Nilai 3 (tinggi) menunjukkan bahwa kebijakan mampu secara signifikan meningkatkan pengelolaan ekowisata, ditandai dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat, serta bertambahnya kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

Dalam konteks ekowisata Desa Pinang Banjar, efisiensi berkaitan dengan kemampuan mengelola potensi wisata secara optimal meskipun sumber daya keuangan, SDM, dan sarana prasarana masih terbatas. Nilai 1 (rendah) mencerminkan kondisi saat ini, di mana keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pengelola, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi menyebabkan upaya pengembangan wisata belum memberikan hasil yang signifikan. Nilai 2 (sedang) menggambarkan kondisi ketika sebagian sumber daya mulai dimanfaatkan secara lebih efektif, misalnya melalui kolaborasi dengan pihak eksternal atau pemanfaatan media digital sederhana, namun masih terdapat pemborosan dan keterbatasan kapasitas. Nilai 3 (tinggi) menunjukkan kebijakan berjalan efisien, dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal, penggunaan teknologi promosi yang tepat, serta pengelolaan wisata yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Ekuitas mencakup pemerataan manfaat ekowisata bagi seluruh masyarakat Desa Pinang Banjar, termasuk kelompok ekonomi lemah. Keadilan juga menilai apakah kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan wisata dan memperoleh manfaat ekonomi hanya dinikmati

oleh kelompok tertentu atau tersebar secara merata. Nilai 1 (rendah) menggambarkan kondisi ketika manfaat ekowisata hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat dan belum melibatkan warga secara luas. Nilai 2 (sedang) menunjukkan adanya pemerataan yang mulai berkembang, di mana sebagian masyarakat telah terlibat dalam kegiatan wisata dan UMKM, meskipun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nilai 3 (tinggi) menunjukkan kebijakan yang adil, ketika seluruh masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan ekowisata.

Kelayakan politik mencakup sejauh mana alternatif kebijakan dapat diterima dan didukung oleh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Nilai 1 (rendah) mencerminkan kondisi ketika pengembangan ekowisata belum memperoleh dukungan kebijakan yang kuat, terlihat dari tidak tercantumnya Desa Pinang Banjar dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RIPPARD, serta minimnya dukungan anggaran. Nilai 2 (sedang) menunjukkan adanya dukungan politik secara terbatas, misalnya melalui program atau perhatian pemerintah yang bersifat sporadis, namun belum terintegrasi secara menyeluruh. Nilai 3 (tinggi) menunjukkan kelayakan politik yang kuat, ditandai dengan masuknya Desa Pinang Banjar dalam perencanaan pembangunan daerah, dukungan anggaran yang berkelanjutan, serta komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan ekowisata.

Kelayakan administratif berkaitan dengan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, prosedur kerja, serta sarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ekowisata. Nilai 1 (rendah) mencerminkan kondisi saat ini, yaitu belum adanya kelembagaan pengelola wisata yang kuat, minimnya SDM terlatih, tidak adanya SOP pengelolaan wisata, serta lemahnya koordinasi antar pihak. Nilai 2 (sedang) menunjukkan kesiapan administratif yang mulai terbentuk, seperti adanya kelompok pengelola wisata meskipun masih memerlukan pendampingan dan peningkatan kapasitas. Nilai 3 (tinggi) menunjukkan kesiapan administratif yang baik, dengan kelembagaan yang jelas, SDM yang kompeten, SOP yang terstandar, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemangku

kepentingan lainnya sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Analisis Alternatif Kebijakan

Alternatif kebijakan berikut dirumuskan berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pengelola Ekowisata Pinang Banjar. Setiap alternatif dijelaskan secara singkat sebelum menyebutkan sumber dasar penentuannya.

a) Peningkatan Infrastruktur Ekowisata Desa Pinang Banjar

Alternatif kebijakan pertama berfokus pada upaya peningkatan infrastruktur ekowisata Desa Pinang Banjar sebagai dasar dalam mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Adapun tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan serta mendukung pengelolaan dan promosi ekowisata secara lebih optimal. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya peningkatan infrastruktur ekowisata Desa Pinang Banjar adalah penambahan fasilitas dasar seperti toilet, area parkir, tempat istirahat, serta peningkatan jaringan internet.

Alternatif kebijakan pertama ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa permasalahan infrastruktur yang masih dihadapi saat ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diperoleh temuan bahwa kondisi infrastruktur ekowisata Desa Pinang Banjar masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung aktivitas wisata. Keterbatasan fasilitas dasar dan akses jaringan internet menjadi kendala utama dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan serta pengelolaan ekowisata secara optimal. Hal ini sebagaimana diakui oleh pengelola ekowisata Desa Pinang Banjar, Pak Sangkut Roni dan Ibu Rusma yang menyatakan bahwa:

“ . . . Untuk fasilitas ekowisata saat ini memang sudah tersedia toilet, namun jumlahnya masih sangat terbatas karena hanya tersedia satu unit ” (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Selain itu, Ibu Rusma juga menambahkan bahwa:

“ . . . Kami juga menyediakan mushola untuk keperluan ibadah wisatawan, namun kondisinya masih kurang layak karena

keterbatasan dana yang dimiliki ” (Wawancara, 15 Oktober 2025).”

Adapun alternatif kebijakan ini dirumuskan berangkat dari hasil temuan dan observasi lapangan yang menunjukkan bahwa saat ini kondisi Infrastruktur Ekowisata Desa Pinang Banjar masih banyak terjadi kerusakan jalan, minimnya fasilitas, dan lemahnya jaringan internet.

b) Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Pokdarwis

Alternatif kebijakan kedua berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai kelembagaan resmi dalam pengelolaan ekowisata Desa Pinang Banjar. Adapun tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan, pelayanan, dan promosi wisata, serta menciptakan sistem pengelolaan ekowisata yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Pokdarwis antara lain melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata, pelayanan terhadap wisatawan, serta promosi ekowisata melalui kelembagaan resmi seperti Pokdarwis.

Alternatif kebijakan kedua ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan belum adanya struktur kelembagaan pengelola wisata yang jelas, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekowisata, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola ekowisata, diperoleh temuan bahwa pengelolaan ekowisata Desa Pinang Banjar masih dilakukan secara informal dan belum melibatkan masyarakat secara luas, sehingga potensi ekowisata belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sebagaimana diakui oleh pengelola ekowisata Desa Pinang Banjar, Kak Jainari, yang menyatakan bahwa:

“ . . . Saat ini belum terbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sehingga pengelolaan ekowisata masih dilakukan secara pribadi. Hal tersebut terjadi karena belum adanya kontribusi dan tindak lanjut dari pemerintah desa dalam mengelola destinasi wisata secara bersama-sama ” (Wawancara, 15 Oktober 2025).

c) Sinergi Antar Stakeholder dan Integrasi Kebijakan

Alternatif kebijakan ketiga berfokus pada penguatan sinergi antar-stakeholder serta integrasi kebijakan pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar pada tingkat daerah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan dukungan kelembagaan dan legitimasi kebijakan yang lebih kuat melalui keterlibatan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dinas terkait, serta masyarakat lokal dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu. Beberapa upaya yang dilakukan dalam alternatif kebijakan ini antara lain mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan Ekowisata Pinang Banjar ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RIPPARD, sebagai dasar pemberian dukungan anggaran, program pembinaan, dan pendampingan teknis.

Alternatif kebijakan ini dirumuskan berdasarkan hasil temuan lapangan dan wawancara yang menunjukkan bahwa hingga saat ini masih lemahnya sinergi antar stakeholder dalam pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar tidak hanya disebabkan oleh kurangnya komunikasi, tetapi juga oleh tidak jelasnya mekanisme pengambilan keputusan lintas tingkat pemerintahan. Pengelola ekowisata di tingkat desa tidak memiliki kewenangan untuk mendorong integrasi program ke tingkat kabupaten, sementara pemerintah desa belum menjadikan pengembangan ekowisata sebagai agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain, pemerintah kabupaten belum memasukkan Ekowisata Desa Pinang Banjar ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RIPPARD. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya dukungan anggaran dan program lintas sektor yang berkelanjutan, sehingga koordinasi antar-aktor menjadi terhambat.

d) Penguatan Promosi Digital dan Branding Ekowisata

Alternatif kebijakan keempat berfokus pada penguatan promosi digital dan branding Ekowisata Desa Pinang Banjar sebagai upaya untuk meningkatkan visibilitas destinasi dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat luas. Tujuan dari kebijakan ini adalah memperkenalkan potensi ekowisata Desa Pinang Banjar secara lebih optimal melalui pemanfaatan media digital sehingga mampu menarik minat kunjungan wisatawan.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam alternatif kebijakan ini antara lain pengelolaan akun resmi ekowisata Desa Pinang Banjar pada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, penyediaan konten informasi wisata secara rutin, serta penguatan identitas visual destinasi sebagai bagian dari strategi branding ekowisata. Promosi digital dipandang penting karena memiliki jangkauan yang luas, biaya relatif rendah, serta mampu menjangkau segmen wisatawan yang lebih beragam.

Alternatif kebijakan ini dirumuskan berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pengelola ekowisata yang menunjukkan bahwa promosi ekowisata Desa Pinang Banjar masih belum dikelola secara optimal. terdapat akun Instagram, pengelolannya belum aktif dan belum didukung oleh pemanfaatan platform media sosial lainnya.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pengelola ekowisata Desa Pinang Banjar yang menyatakan bahwa:

“ . . . Promosi ekowisata selama ini masih terbatas. Akun Instagram memang ada, tetapi belum dikelola secara aktif, dan kami juga belum memanfaatkan media sosial lain seperti TikTok. Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat akun resmi yang benar-benar fokus memperkenalkan Ekowisata Desa Pinang Banjar.” (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Tabel 1. Tabel Perbandingan Keuntungan dan kerugian alternatif kebijakan

Alternatif	Keuntungan	Kerugian
Peningkatan Infrastruktur	Akses meningkat, kenyamanan bertambah	Biaya besar, waktu pembangunan lama
Pemberdayaan & Pokdarwis	Kapasitas masyarakat meningkat	Perlu pendampingan berkelanjutan
Sinergi & Integrasi Kebijakan	Ada dukungan pemda	Proses birokratis lama
Promosi Digital	Biaya murah; jangkauan luas	Perlu SDM kreatif

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi alternatif menggunakan kriteria Patton dan Sawicki (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan). Berikut tabel evaluasi ringkasnya:

Tabel. 2 Hasil Evaluasi Alternatif

Alternatif	Alternatif Kebijakan			
	1	2	3	4
Efektivitas	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Efisiensi	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kecukupan	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
Kesetaraan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Responsivitas	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

Pemberian skor pada setiap alternatif kebijakan dalam tabel evaluasi dilakukan berdasarkan sintesis hasil wawancara dengan pengelola ekowisata dan observasi lapangan. Skor efektivitas dan kecukupan ditentukan dari sejauh mana alternatif kebijakan mampu menjawab permasalahan utama yang dihadapi Desa Pinang Banjar, seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas masyarakat, promosi, dan kelembagaan.

Skor efisiensi mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kemampuan implementasi di tingkat desa, sementara kelayakan administratif dan politik dinilai berdasarkan kesiapan kelembagaan serta posisi pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar dalam perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang bersifat parsial tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, sehingga pendekatan kebijakan integratif memperoleh nilai kelayakan tertinggi.

Rekomendasi Terpilih

Berdasarkan tabel hasil evaluasi terhadap 4 alternatif kebijakan, adapun beberapa rekomendasi paling tepat adalah kombinasi integratif. Dibandingkan alternatif kebijakan lainnya pendekatan kebijakan integratif dinilai paling layak dan implementatif karena mampu menjawab permasalahan teknis dan kelembagaan secara bersamaan. Alternatif ini tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur atau promosi, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat, pembentukan kelembagaan pengelola, serta integrasi kebijakan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kondisi tata kelola di Kabupaten Muara Enim, pendekatan integratif menjadi pilihan yang paling realistis dan berkelanjutan dari beberapa alternatif karena seluruh permasalahan saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu opsi. Adapun rekomendasi utama adalah:

- Integrasi Ekowisata Pinang Banjar ke dalam RPJMD dan RIPPARD Kabupaten Muara Enim sehingga mendapatkan dukungan anggaran, program pembinaan, dan prioritas pembangunan.
- Optimalisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar wisata seperti jalan, toilet, area parkir, dan fasilitas kenyamanan.
- Pembentukan dan penguatan Pokdarwis sebagai lembaga pengelola wisata berbasis masyarakat.
- Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal dalam pelayanan wisata, homestay, kuliner, serta pengelolaan lingkungan.
- Penguatan promosi digital dan branding ekowisata untuk meningkatkan visibilitas dan identitas destinasi.
- Pembentukan forum koordinasi antar-stakeholder untuk memastikan kebijakan berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan

- Tahap Perencanaan:** Pemerintah desa mengusulkan pengembangan ekowisata dalam Musrenbang Desa; Menyusun proposal integrasi ke RPJMD/RIPPARD bekerja sama dengan kecamatan dan dinas pariwisata.
- Tahap Penguatan Kelembagaan:** Membentuk Pokdarwis melalui SK Kepala Desa; Menyusun struktur organisasi, tugas, dan rencana kerja Pokdarwis.
- Tahap Pengembangan Infrastruktur:** Mengalokasikan Dana Desa untuk perbaikan jalan, toilet, parkir, dan fasilitas dasar lainnya; Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk pembangunan infrastruktur skala besar.
- Tahap Pemberdayaan Masyarakat:** Melaksanakan pelatihan hospitality, kewirausahaan, pengelolaan homestay, dan pengelolaan sampah; Melibatkan akademisi atau lembaga pelatihan.
- Tahap Promosi dan Branding:** Membuat akun resmi media sosial dan mengembangkan identitas visual ekowisata; Membuat konten rutin berupa foto, video, dan informasi wisata.

- f) **Tahap Monitoring dan Evaluasi:** Mengadakan rapat rutin stakeholder setiap 3 bulan; Mengevaluasi perkembangan kunjungan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas promosi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama. Pertama, faktor penghambat paling menentukan dalam pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar bukan semata keterbatasan infrastruktur fisik, melainkan lemahnya sinergi antar-stakeholder dan ketiadaan integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kondisi ini menyebabkan pengembangan ekowisata tidak memperoleh dukungan kelembagaan, anggaran, dan program lintas sektor secara berkelanjutan. Kedua, hasil evaluasi alternatif kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat parsial, seperti fokus pada promosi atau infrastruktur saja, tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Kebijakan integratif dinilai lebih layak dan implementatif karena mampu menjawab keterkaitan antar-permasalahan, mulai dari infrastruktur dasar, kapasitas masyarakat, kelembagaan pengelola, hingga posisi ekowisata dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketiga, implementasi kebijakan integratif mensyaratkan adanya prasyarat kelembagaan dan administratif yang realistis di tingkat desa dan kabupaten. Di tingkat desa, prasyarat tersebut meliputi penguatan kapasitas masyarakat dan pembentukan kelembagaan pengelola ekowisata yang lebih formal. Sementara itu, di tingkat kabupaten, prasyarat utama adalah komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RIPPARD, sebagai dasar pengambilan keputusan anggaran dan program. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan informan penelitian terbatas pada pengelola ekowisata di tingkat desa, sehingga perspektif aktor pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya belum tergali secara langsung. Kedua, analisis dokumen perencanaan daerah dilakukan secara terbatas pada pengecekan keberadaan atau ketiadaan pengembangan Ekowisata Desa Pinang Banjar, tanpa analisis mendalam terhadap substansi

kebijakan. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi kedalaman analisis mengenai dinamika koordinasi lintas aktor. Sebagai agenda tindak lanjut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan aktor lintas tingkat pemerintahan, seperti pemerintah kabupaten dan organisasi perangkat daerah terkait, serta memperluas analisis terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, kajian lanjutan dapat difokuskan pada perancangan model tata kelola ekowisata berbasis kolaborasi yang lebih operasional sebagai panduan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. A., Cahyani, N. S. N., Ratnasari, A., Rahayu, C. S., Anisa, M. S., Gunawan, W. A., ... & Fajar, A. N. (2023). Strategi Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Desa Pasanggrahan. docx. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 41044108. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpk/article/download/1868/1459/15370>
- Anggraini, R., & Marheni, D. K. (2023). Strategi pengembangan potensi wisata sebagai upaya peningkatan eksistensi ekowisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada Desa Wisata Kampung Terih. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 3(3), 1040-1051. https://www.researchgate.net/publication/376620200_Strategi_Pengembangan_Potensi_Wisata_sebagai_Upaya_Peningkatan_Eksistensi_Ekowisata_dan_Meningkatkan_Ekonomi_Masyarakat_pada_Desa_Wisata_Kampung_Terih
- Bangse, K., Midiani, L. P. I., Arsana, M. E., & Widiantara, I. B. G. (2024). Penyediaan Infrastruktur Lampu Jalan Berbasis Solar Panel untuk Mendukung Pengembangan Desa Ekowisata Berkelanjutan Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(10), 4283-4288. <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/download/1690/1317/10455>
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1995). *Tourism: Principles and*

- Practice. London: Longman.
<https://share.google/FkXyYP04qe1fqqbYR>
- Direktorat Jenderal Pariwisata. (1995). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta: Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.
<https://share.google/32ZZ0NtmGdKL2WhHx>
- Harefa, M. B., Hendri, S., Roy, J., Rizalitahe, A. S., Purba, J. D. B., & Ginting, E. Y. S. B. (2024). Perancangan ekowisata dan desa wisata di kecamatan bersatagi. *Abdimas mandiri-Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 18-22.
<https://ejournal.politeknikmbp.ac.id/index.php/abdimaspkm/article/view/260/241>
- Haryono, G., & Albetris. (2022). Peranan komunikasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan e-tourism marketing untuk meningkatkan niat berkunjung wisatawan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 136–143. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi.
<https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojseko/nomis/article/view/509>
- Hasna, D. H., & Sutopo, Y. K. D. Arahana Perencanaan Infrastruktur Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 15(1), 79-91.
https://jurnal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/103386/41561
- Hidayat, S. (2016). Strategi Pengembangan Ekowisata di Desa Kinarum Kabupaten Tabalong. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(3), 282-292.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jht/article/view/3622/3133>
- Ompusunggu, V. M. (n.d.). Dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi Universitas Quality Medan.
<https://jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/view/870>
- Ramlan, R., Hakim, N., Yusrizal, M., & Fajriawati, F. (2018). Optimalisasi Potensi Ekowisata Di Lahan Hutan Bakau Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Bencana Pada Wilayah Pesisir Desa Lubuk Kertang. *Borneo Law Review*, 2(1), 1-15.
<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/718>
- Rasidi, M. (2025). Optimalisasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pengembangan Wisata Pantai Greenthing Beach Desa Randutatah Kecamatan Paiton Probolinggo. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 5722-5727.
<https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/1309>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Sinarta, I. N., Candrayana, K., & Kurniawan, A. (2021). Pkm dengan tim pengembangan desa wisata dalam perencanaan masterplan infrastruktur ekowisata di desa besang kawan, kelurahan semarapura kaja. *Jurnal Abdi Daya*, 1(2), 23-32.
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/mrill/article/view/4148>
- Zakaria, F., & Suprihardjo, R. (2014). Konsep pengembangan kawasan desa wisata di desa bandungan kecamatan pakong kabupaten pamekasan. *Jurnal teknik ITS*, 3(2), C245C249.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1442338&val=4186&title=Konsep%20Pengembangan%20Kawasan%20Desa%20Wisata%20di%20Desa%20Bandungan%20Kecamatan%20Pakong%20Kabupaten%20Pamekasan>